



## TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER : ANALISIS PERATURAN MENTERI RISTEKDIKTI NOMOR 46 TAHUN 2017

**A Zulkarnain Ali**

Universitas PGRI Argopuro Jember  
Email: [alam.zulkarnain80@gmail.com](mailto:alam.zulkarnain80@gmail.com)

### Abstrak

Pendidikan inklusif di perguruan tinggi merupakan bentuk komitmen dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Universitas PGRI Argopuro Jember, dengan fokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi berbagai kebijakan, faktor pendukung, hambatan, serta pola pendidikan inklusif yang diterapkan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta minimnya dukungan pendanaan. Beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan layanan pendidikan inklusif, termasuk penyediaan teknologi adaptif dan program pendampingan akademik, namun penerapannya belum merata di seluruh institusi. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini meliputi adanya regulasi pemerintah, kesadaran akademik yang meningkat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan kebijakan pendidikan inklusi. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta penerapan Universal Design for Learning (UDL) dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, mahasiswa berkebutuhan khusus dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara dan mengoptimalkan potensi akademik mereka.

**Kata Kunci:** Pendidikan inklusif, kebijakan pendidikan, perguruan tinggi, mahasiswa berkebutuhan khusus, aksesibilitas pendidikan.

### Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan konsep yang menekankan pada kesempatan belajar yang setara bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (UNESCO, 2009). Menurut Ainscow (2005), pendidikan inklusif adalah proses peningkatan partisipasi semua siswa dalam lingkungan pendidikan dan mengurangi eksklusi dalam bentuk apapun. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam memperoleh pendidikan dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak pendidikan tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif merupakan konsep yang menekankan pada kesempatan belajar yang setara bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam memperoleh pendidikan dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam lingkungan belajar yang sama. Prinsip utama dari pendidikan inklusif adalah keberagaman, kesetaraan, dan aksesibilitas bagi semua individu. Di tingkat global, pendidikan inklusif telah menjadi perhatian utama, terutama setelah disahkannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB pada tahun 2006. Di Indonesia, pemerintah telah merespons gagasan ini dengan menetapkan berbagai regulasi yang mendukung pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Beberapa peraturan penting yang mendukung pendidikan inklusif di perguruan tinggi antara lain:

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan perguruan tinggi di Universitas PGRI Argopuro Jember. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus memperoleh akses yang setara dalam pendidikan tinggi, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi. Perguruan tinggi wajib menyediakan layanan pendidikan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan ini meliputi dukungan akademik, aksesibilitas infrastruktur, serta bantuan dalam bentuk alat bantu belajar dan teknologi adaptif. Selain itu, perguruan tinggi harus menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Untuk mendukung hal ini, dosen dan tenaga kependidikan diberikan pelatihan guna memahami metode pembelajaran inklusif.

Perguruan tinggi dapat menyesuaikan metode pengajaran dan evaluasi akademik agar lebih inklusif. Mahasiswa berkebutuhan khusus juga diberikan fleksibilitas dalam penyelesaian studi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, perguruan tinggi wajib memastikan fasilitas kampus ramah disabilitas, termasuk akses ke gedung, ruang kelas, dan layanan teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Pemerintah dan perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan inklusif. Pendanaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dapat berasal dari anggaran negara maupun sumber lain yang sah guna memastikan keberlanjutan program pendidikan inklusif.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi di Universitas PGRI Argopuro Jember menjadi tantangan tersendiri. Meskipun regulasi telah disusun dengan baik, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan infrastruktur yang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, seperti aksesibilitas fisik, teknologi pendukung, dan layanan akademik yang adaptif. Selain faktor infrastruktur, kesiapan tenaga pendidik juga menjadi aspek krusial dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Kendala dan tantangan masih banyak sekali seperti terdapat dosen dan staf akademik belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus. Akibatnya, proses pembelajaran sering kali

tidak inklusif dan cenderung menempatkan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan khusus yang berorientasi pada metode pengajaran yang inklusif.

Analisis implementasi pendidikan inklusif menunjukkan bahwa faktor budaya dan sosial juga berperan dalam keberhasilan kebijakan ini. Sikap masyarakat akademik, baik dari dosen maupun mahasiswa lainnya, sering kali menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Stigma dan stereotip terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus masih cukup tinggi, sehingga sering kali mereka merasa terisolasi dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu, pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga perubahan paradigma dalam pola pikir masyarakat akademik. Ada beberapa faktor yang memberikan dampak seperti, peran kebijakan internal perguruan tinggi dalam mendukung pendidikan inklusif juga menjadi faktor penting yang perlu dianalisis. Beberapa perguruan tinggi telah mulai mengadopsi kebijakan yang lebih ramah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, seperti adanya unit layanan disabilitas yang menyediakan pendampingan akademik dan fasilitas khusus. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini masih bervariasi antar perguruan tinggi, tergantung pada komitmen institusi dan ketersediaan sumber daya.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi terutama di di Universitas PGRI Argopuro Jember dapat dianalisis melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down menekankan pentingnya regulasi dari pemerintah sebagai acuan utama dalam implementasi kebijakan, sementara pendekatan bottom-up lebih melihat bagaimana aktor-aktor di tingkat bawah, seperti dosen dan mahasiswa, berperan dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, kombinasi kedua pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif di perguruan tinggi terutama di di Universitas PGRI Argopuro Jember. Tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah berhasil menerapkan kebijakan pendidikan inklusif dengan baik seperti di Universitas PGRI Argopuro Jember yang telah memiliki prodi Pendidikan Anak Usia Dini dan juga sudah membentuk Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) yang menyediakan berbagai layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Keberadaan unit seperti ini terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam menjalani pendidikan tinggi.

Banyak perguruan tinggi membuat kebijakan inklusif akan tetapi kebijakan pendidikan inklusif masih terbatas pada regulasi administratif tanpa implementasi yang konkret. Kurangnya pendanaan dan dukungan kebijakan internal sering kali menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam analisis kualitatif, wawancara dengan mahasiswa berkebutuhan khusus mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kurangnya kesadaran dari dosen dan mahasiswa lain tentang kebutuhan mereka. Banyak dari mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan karena metode pengajaran yang tidak inklusif. Beberapa perguruan tinggi yang telah mengadopsi sistem pembelajaran yang fleksibel dan menggunakan teknologi pendukung terbukti lebih efektif dalam mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta juga dapat menjadi strategi dalam meningkatkan pendidikan inklusif di Universitas PGRI Argopuro Jember. Universitas PGRI Argopuro Jember telah mulai mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi yang dapat membantu mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengakses materi pembelajaran. Perangkat lunak dan system pembelajaran daring seperti ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan kegiatan belajar bagi mahasiswa khusus yang sering kali menjadi kendala dalam implementasi pendidikan inklusif. Dalam konteks global, banyak negara telah berhasil mengimplementasikan pendidikan inklusif di perguruan tinggi dengan pendekatan yang komprehensif. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah memiliki regulasi yang kuat serta sistem pendukung yang matang bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Studi komparatif dengan negara-negara ini dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang lebih efektif.

Berdasarkan paparan analisis masalah diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang kebijakan pendidikan inklusif di Universitas PGRI Argopuro Jember dalam rangka analisis penerapan, sehingga dapat ditemukan pola implementasi kebijakan pendidikan inklusi di jenjang perguruan tinggi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui perspektif partisipan. Selain itu, Bogdan dan Biklen (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan pengalaman individu dalam suatu konteks sosial tertentu. Sementara itu, Merriam dan Tisdell (2016) menekankan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan diterapkan dalam perguruan tinggi.

Subyek dalam penelitian ini meliputi mahasiswa berkebutuhan khusus, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak pengelola kebijakan di perguruan tinggi yang berperan dalam implementasi pendidikan inklusif. Pemilihan subyek dilakukan dengan teknik purposive sampling agar data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian, Pemilihan subyek dilakukan dengan teknik purposive sampling agar data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian (Merriam & Tisdell, 2016). Instrumen penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa berkebutuhan khusus serta pihak terkait lainnya. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Langkah-langkah analisis mencakup transkripsi wawancara, pengkodean data, serta interpretasi temuan berdasarkan teori yang relevan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Peraturan 46 Tahun 2017 di Universitas PGRI Argopuro Jember**

Berdasarkan studi literatur, implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 di Universitas PGRI Argopuro Jember masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun universitas telah memiliki kebijakan dalam mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus, infrastruktur dan sumber daya masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Secara akademik, perguruan tinggi ini telah mengembangkan program inklusif dengan menyediakan layanan pendampingan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Akan tetapi belum semua tenaga pengajar mendapatkan pelatihan tentang metode pembelajaran inklusif. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari. Selain itu, ketersediaan alat bantu belajar berbasis teknologi adaptif masih terbatas, sehingga mahasiswa dengan disabilitas tertentu mengalami kendala dalam mengakses materi pembelajaran.

Dalam aspek non-akademik, Universitas PGRI Argopuro Jember juga telah mencoba membangun komunitas pendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Akan tetapi, tantangan utama yang masih dihadapi adalah stigma sosial dari beberapa kalangan akademik yang masih kurang memahami pentingnya pendidikan inklusif, dampak implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas PGRI Argopuro Jember menunjukkan adanya upaya yang positif, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesadaran kolektif. Perguruan tinggi perlu terus berinovasi dalam menyediakan layanan terbaik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus agar tujuan pendidikan inklusif dapat benar-benar terwujud.

Pola pendidikan inklusi yang ideal di perguruan tinggi harus mencerminkan lingkungan yang mendukung keberagaman dan memastikan aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran berbasis *universal design for learning* (UDL), yang memungkinkan fleksibilitas dalam metode pembelajaran, evaluasi, serta akses terhadap materi akademik. Peran perguruan tinggi perlu membangun sistem pendampingan akademik dan non-akademik yang melibatkan mentor atau tutor sebaya guna memberikan dukungan emosional dan akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Penggunaan teknologi adaptif juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif, seperti penggunaan perangkat lunak pembaca layar, aplikasi teks ke suara, serta materi kuliah dalam format digital yang dapat diakses dengan berbagai cara.

Keterlibatan aktif civitas akademika dalam menciptakan lingkungan inklusif di Universitas PGRI Argopuro Jember juga sangat penting. Dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa lainnya harus diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai pentingnya pendidikan inklusif agar dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Dengan menerapkan pola pendidikan inklusif yang tepat, mahasiswa berkebutuhan khusus dapat memiliki pengalaman belajar yang setara dan mampu mencapai potensi akademik mereka secara maksimal.

## **Hambatan Implementasi Peraturan 46 Tahun 2017 di Universitas PGRI Argopuro Jember**

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi terutama di Universitas PGRI Argopuro Jember masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas yang terdapat di dalam kampus. Tidak banyak fasilitas yang memberikan fasilitas maupun kebijakan yang sesuai bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, seperti aksesibilitas gedung, jalur khusus, dan alat bantu belajar berbasis teknologi. Selain itu, kurangnya kesiapan tenaga pendidik dalam mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus menjadi tantangan tersendiri sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017. Banyak dosen yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai metode pembelajaran inklusif, sehingga mahasiswa berkebutuhan khusus sering kali mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan. Dibutuhkan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik untuk memastikan efektivitas pendidikan inklusif.

Faktor sosial juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Cara pandang dan *stereotip* negatif terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus masih sering ditemui di lingkungan akademik. Beberapa mahasiswa dan tenaga kependidikan di Universitas PGRI Argopuro Jember ada yang kurang memahami konsep inklusi, sehingga interaksi sosial di kampus menjadi kurang mendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Hambatan lainnya adalah keterbatasan dana dalam mendukung program pendidikan inklusif. Perguruan tinggi sering kali menghadapi kendala anggaran untuk menyediakan fasilitas, alat bantu belajar, serta layanan pendukung lainnya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Dukungan pendanaan yang memadai sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal. Selain hambatan internal yang terdapat di Universitas PGRI Argopuro Jember, regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi faktor yang menghambat implementasi pendidikan inklusif. Beberapa perguruan tinggi mungkin memiliki kebijakan internal yang belum sepenuhnya selaras dengan peraturan pemerintah, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Dampak yang lain adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan inklusif di kalangan mahasiswa dan tenaga kependidikan juga menjadi tantangan. Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar seluruh civitas akademika dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang benar-benar inklusif.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Universitas PGRI Argopuro Jember, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam konteks Indonesia, regulasi seperti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan perguruan tinggi. Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa perguruan tinggi telah berupaya menyediakan layanan pendidikan inklusif, seperti penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas,

penggunaan teknologi adaptif, serta pengembangan sistem pendampingan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Banyak perguruan tinggi masih mengalami kendala dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam metode pembelajaran inklusif, serta keterbatasan dalam pendanaan dan dukungan institusional. Faktor pendukung yang ditemukan dalam implementasi kebijakan ini meliputi adanya dukungan regulasi pemerintah, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan inklusif, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif. Sebaliknya, faktor penghambat yang diidentifikasi mencakup kurangnya pemahaman dan kesadaran dari tenaga pendidik dan mahasiswa, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tantangan dalam menyesuaikan kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus.

Dampak dari implementasi kebijakan ini terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus cukup signifikan. Di satu sisi, mereka mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi dan kesempatan untuk berkembang di lingkungan akademik yang lebih inklusif. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas yang lebih lengkap, serta penguatan kebijakan internal di setiap perguruan tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan inklusi di perguruan tinggi, diperlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif. Perguruan tinggi harus lebih aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara nyata dengan memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik, menyesuaikan kurikulum, serta memperluas aksesibilitas kampus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, pendidikan inklusif di perguruan tinggi dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali.

## **Daftar Pustaka**

- Ainscow, M. (2005). Developing Inclusive Education Systems. *Educational Review*, 57(2), 139-148.
- Andayani, T., & Afandi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 3(2), 123-135.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2019). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2019). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Pearson.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Forlin, C. (2010). *Teacher Education for Inclusion*. Routledge.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.

Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and Inclusive Education Debate. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.

Munawir, M. (2019). Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 15(1), 45-60.

Shakespeare, T. (2013). *Disability Rights and Wrongs Revisited*. Routledge.